

# ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014-2016

Sefira Dwi Wulandari

D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

[16212056@students.uii.ac.id](mailto:16212056@students.uii.ac.id)

## ABSTRAK

*Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman merupakan instansi yang bergerak dibidang pelayanan masyarakat yang mengukur kinerjanya melalui pencapaian target dalam memenuhi kepentingan umum dan berpacu pada LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan). Dalam melakukan pengukuran kinerja karyawan, penulis melakukan analisis kinerja dalam aspek keuangan dan non-keuangan dalam periode anggaran tahun 2014-2016 dengan cara mengumpulkan data sekunder. Pengukuran kinerja meliputi beberapa perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang dimana hasilnya cenderung meningkat dan mengalami kemajuan.*

**Keyword:** Pengukuran, Kinerja, LAKIP

## PENDAHULUAN

Sebagai daerah yang otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004 yang merupakan revisi terhadap UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kedua Undang-Undang di bidang otonomi daerah tersebut berdampak pada terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah. Adapun salah satu alat

untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2002). Analisis rasio keuangan merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD (Halim, 2002).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dijadikan sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Oleh karena itu, pemerintah harus bertindak efektif dan efisien dalam mengelola keuangan daerahnya. Untuk memberikan jaminan pengalokasian sumber daya yang ada secara ekonomis, efisien dan efektif, maka

informasi akuntansi manajemen sangat penting dimiliki, seiring dengan timbulnya paradigma baru organisasi pemerintahan yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik. Peningkatan kualitas pelayanan hanya bisa tercapai dengan pemanfaatan dana yang terarah untuk mengoptimalkan pelayanan publik melalui proses penganggaran yang baik. Dalam UU RI Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa adanya sumber-sumber dalam melakukan pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah. sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah tersebut mencakup pendapatan asli daerah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah dan pinjaman daerah.

Guna menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dapat dilakukan dengan menganalisa laporan keuangan yang sudah tersedia. Analisis laporan keuangan merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah

Daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Keberadaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat penting untuk menciptakan budaya transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka kepentingan menciptakan *good governance*.

Dari uraian diatas, penulis akan membahas tentang penilaian dan pengukuran kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerjanya baik dari aspek keuangan maupun non keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Karena kedua aspek tersebut saling berhubungan, maka penulis perlu melakukan pengukuran kinerja menggunakan perhitungan rasio keefektivitasan dan keefisienan untuk mengetahui bagaimana kualitas dari pelayanan jasa yang diberikan dan kualitas pengelolaan keuangannya. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun Tugas Akhir dengan judul “ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2014-2016”.

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisis kinerja keuangan dan non keuangan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sleman Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan jenis data sekunder yang bersifat kuantitatif selama tiga tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2016, yang

diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman berupa laporan tahunan yang bersangkutan. Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Belanja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan lain-lain. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian dan sebagai institusi melalui data data seri waktu (*time series*) pengumpulan data sekunder diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

### HASIL & PEMBAHASAN

Penilaian kinerja dalam keuangan maupun non-keuangan merupakan suatu alternatif yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja suatu instansi khususnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang dapat dilihat dalam pembahasan berikut:

#### a. Perspektif Keuangan

Pengukuran dengan perspektif keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dilakukan dengan membandingkan antara anggaran dana yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan realisasi anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran.

***Tabel 3.1 Laporan Pendapatan Asli Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016***

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Presentase (%)	Keterangan
2014	4.627.537.000	5.344.842.275	115,50	Efektif
2015	5.063.900.400	5.308.417.950	104,83	Efektif
2016	5.981.765.250	6.310.287.500	105,49	Efektif

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014-2016

Dari uraian diatas melihat presentase anggaran pendapatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi pada instansi ini sudah dikatakan baik. Karena dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami penurunan presentase yang kemudian beranjak naik pada tahun 2016 dan masih mampu mencapai target yang telah ditetapkan karena masih pada presentase lebih dari 100%. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sudah dikatakan mandiri. Dikatakan mandiri karena mampu mengelola daerahnya untuk meningkatkan sumber PAD nya, yang secara tidak langsung kegiatan perekonomian daerah tersebut juga akan meningkat. Secara keseluruhan terbukti bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sangat efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

***Tabel 3.2 Laporan Anggaran Belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016***

Tahun	Anggaran Belanja (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Persentase (%)	Keterangan
2014	21.945.819.409	20.519.763.474	93,49	Efisien
2015	28.160.504.104	25.474.364.217	90,46	Efisien
2016	31.475.175.399	29.654.561.048	94,22	Efisien

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2014-2016

Dari uraian tingkat keefisienan anggaran belanja diatas, dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman berada dalam kategori baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan kemampuannya melakukan penyerapan atau penggunaan anggaran belanja daerah sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, namun tidak ada yang melebihi anggaran yang ditetapkan dan berada pada persentase lebih dari 90% yang artinya hanya terdapat kurang dari 10% dari batas kriteria persentase yaitu 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sudah efektif dan efisien.

#### b. Perspektif Pelanggan

Pelanggan yang dimaksud dalam perspektif pelanggan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman adalah para pedagang pasar. Pada perspektif ini yang dijadikan tolak ukurnya yaitu kepuasan pedagang terhadap kinerja dan pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Kepuasan pedagang yang dimaksud berupa pengaduan atau komplain atas pelayanan yang diberikan

dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Jumlah pengaduan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman ini dapat dilihat dari kotak saran, website pemerintah daerah Kabupaten Sleman, social media, *call center* dan *sms center* yang terdapat pada bagian informasi. Pengaduan yang masuk berupa pengaduan atas permasalahan yang terjadi di pasar, industri kecil menengah dan lain lain dimana tempat mereka berjualan atau industry dan perdagangan seperti pengaduan tentang persampahan, pengaduan tentang sarana/prasarana dan lain lainnya.

**Tabel 3.3 Jumlah Pengaduan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016**

Tahun	Jumlah Pengaduan	Jumlah Pedagang	Persentase (%)
2014	157	14.385	1,09
2015	112	15.183	0,74
2016	92	16.640	0,55

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

Pada tabel 3.4 dapat dilihat bahwa jumlah persentase pengaduan pedagang dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 semakin menurun dimana pada tahun 2014 sebesar 1,09%, tahun 2015 sebesar 0,74% dan tahun 2016 sebesar 0,55%. Tingkat penurunan jumlah persentase tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman memiliki tingkat kinerja yang semakin baik dan progresif atas pelayanan yang diberikan karena berkurangnya jumlah pengaduan

pedagang yang didapatkan. Upaya dalam meningkatkan pelayanan masyarakat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi karyawan dan staf secara rutin untuk peningkatan kompetensi serta kemampuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Perspektif Proses Bisnis Internal

Tolak ukur pada perspektif proses bisnis internal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman adalah proses operasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggannya melalui penambahan fasilitas komputer dalam memberikan pelayanan dengan jumlah pegawai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Penambahan fasilitas ini ditujukan agar para pegawai di instansi dapat memaksimalkan diri dalam melakukan pekerjaan khususnya pelayanan terhadap pelanggan. Berikut adalah jumlah penambahan komputer dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016:

**Tabel 3.4 Jumlah Penambahan Fasilitas Komputer Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016**

Tahun	Jumlah Komputer	Jumlah Karyawan	Persentase Komputer (%)
2014	25	59	42,37
2015	29	64	45,31
2016	29	61	47,54

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat penambahan fasilitas komputer untuk bekerja maupun untuk melayani pelanggan untuk tahun 2014 ke tahun 2015 terdapat penambahan jumlah komputer dan pada tahun 2016 tidak terdapat penambahan, tetapi jumlah karyawan menurun. Namun persentase dari tahun ke tahun yang dihasilkan dengan jumlah kurang dari 50% yang dapat diartikan bahwa dengan jumlah karyawan yang ada, kurang lebih hanya separuhnya yang menggunakan komputer. Kesimpulan yang diperoleh adalah indikator penambahan fasilitas komputer pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dapat dikatakan cukup baik dalam menunjang kemudahan serta keefektifan melakukan pekerjaan dan pelayanan masyarakat secara teknologi.

d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran ini mengidentifikasi apa yang harus dikuasai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman untuk mencapai tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan. Berikut terdapat beberapa tolak ukur yang digunakan pada perspektif ini yaitu:

1) Kemampuan Karyawan

Kemampuan ini diukur dengan menggunakan tingkat pendidikan dan keahlian karyawan. Data karyawan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman tertera pada tabel berikut:

**Tabel 3.5 Kemampuan Karyawan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016**

Tingkat Pendidikan	2014	Perseentase (%)	2015	Perseentase (%)	2016	Perseentase (%)
S2	7	11,86	11	17,19	11	18,03
S1	21	35,59	24	37,5	22	36,07
D III	5	8,48	4	6,25	3	4,92
SLTA	23	38,98	22	34,38	22	36,06
SLTP	2	3,4	2	3,12	2	3,28
SD	1	1,69	1	1,56	1	1,64
Total	59	100	64	100	61	100

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

Dari perspektif pertumbuhan dan pembelajaran berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa persentase di tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 terjadi peningkatan pada karyawan jenjang S2 dan disertai dengan penurunan pada karyawan jenjang DIII, SLTA, dan jumlah yang tetap sama untuk karyawan jenjang SLTP dan SD. Oleh karena itu semakin banyaknya karyawan yang berpendidikan tinggi maka kinerja instansi akan semakin baik pula karena organisasi mengharapkan peningkatan mutu sumber daya manusia dengan mengikutsertakan karyawan dengan pendidikan dan pelatihan dan dinilai baik.

## 2) Kemampuan Sistem Informasi

Kemampuan sistem informasi dinilai dari peningkatan memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu pada karyawan sehingga mereka dapat memperbaiki proses baru secara efektif. Kemampuan karyawan dalam menguasai sistem informasi diukur dengan melihat berapa banyak karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diadakan. Pendidikan dan pelatihan bagi para staf dan karyawan ini sangat penting dilakukan

dalam rangka meningkatkan kompetensi atau kemampuan staf dan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

**Tabel 3.6 Pendidikan dan Pelatihan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Tahun 2014-2016**

Tahun	Jumlah Karyawan	Jumlah Karyawan yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase (%)
2014	59	17	28,81
2015	64	22	34,37
2016	61	26	42,62

Sumber: Bagian Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

Berdasarkan tabel 3.7 diketahui bahwa kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman pada tahun 2014 karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 17 orang dengan persentase 28,81%, pada tahun 2015 karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 22 orang dengan persentase 34,37%, dan pada tahun 2016 karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 26 orang dengan persentase 42,62%. Setiap tahunnya, persentase karyawan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman terus meningkat, yang juga memberikan nilai yang baik untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman karena telah memperhatikan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi staf maupun karyawan. Sehingga mampu

bekerja secara inovatif dan kreatif dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat untuk ke masa depannya.

## KESIMPULAN & SARAN

### Kesimpulan

Dengan berdasar pada hasil analisa yang telah dilakukan penulis perih, maka penulis telah menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja dengan perspektif keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dapat dikatakan efektif karena mampu mengelola daerahnya untuk meningkatkan sumber PAD dan dikatakan efisien karena pengelolaan anggaran belanja yang diserap maupun digunakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan tidak melebihi dari itu.
2. Pengukuran kinerja non-keuangan dalam perspektif pelanggan, proses bisnis internal maupun pertumbuhan dan pembelajaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sudah dikatakan baik karena selalu mengalami peningkatan di tiap tahunnya karena adanya pengoptimalan usaha Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam meningkatkan kemampuan terus dilakukan.

### Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran yang ditujukan untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. Disarankan untuk melakukan pengukuran kinerja secara finansial

maupun non-finansial untuk mengetahui progress keuangan (PAD dan Anggaran Belanja) demi mengoptimalkan pengelolaan anggaran di tahun-tahun berikutnya dan tingkat kemampuan kinerja pada instansi serta guna mengantisipasi segala kekurangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang akan terjadi kedepannya.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman diharapkan untuk lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran belanja dengan pendapatan yang diperoleh agar tetap efisien dan efektif, perlunya mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif yang kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif sehingga tidak terjadi pemborosan pada anggaran belanja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, R. dan Vijay Govindarajan. 2005. *Management Control System*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: ALFABETA.
- Halim, Abdul. 2002. *Manajemen Keuangan Daerah (edisi revisi)*. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Hasibuan, Malayu. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara*. Jakarta.

- Kaplan, Robert S dan David Norton. 2000. *Balanced Scorecard: Menerapkan Strategi Menjadi Aksi*. Terjemahan oleh Peter R. Yosi Pasla dari Balanced Scorecard: Translating Strategi Into Action (1996). Erlangga. Jakarta.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. BPFY Yogyakarta.
- Munawir, S. 2012. *Analisis Informasi Keuangan*. Liberty. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2014. *Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personal Berbasis Balanced Scorecard*. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Simamora, Hendry. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN: Yogyakarta.
- Wahyudi, Bambang. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Sulita.
- Yuwono, Sony. 2008. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard Menuju Organisasi yang Berfokus pada Strategi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.
- UU RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- UU Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- UU Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintahan Di Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- Peraturan Bupati Sleman No. 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.